

## MANIFESTASI KESETARAAN GENDER DI PERGURUAN TINGGI

RAIHAN PUTRY

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Abstract:** *Following the flow of transformation and the times today, the discourse on women's leadership turned out to be growing and getting a response from the community, along with the growth and development of Scientific Management (Scientific). Leadership is no longer based on talent, heritage, experience and the male gender, but more than the physical and mental readiness of men and women in a planned towards professionalism. All the program is done through planning, analysis and development systematically to raise stamina leadership qualities in accordance with the spirit of the Shari'ah. This paper discusses the concept of gender equality in representation in college. First, gender equality is seen as a condition when women are placed on an equal footing and given the same rights and obligations as men. Secondly, gender equality is seen as a condition that is expected to bring about a change for a better life. Both representations of gender equality is highly influenced by the history, background, purpose, and vision and mission of the organization for women. Furthermore, the representation is then manifested in features of managerial college.*

**Keywords:** *Gender, Physical, Mental, Professionalism*

**Abstrak:** *Mengikuti Arus transformasi dan perkembangan zaman saat ini, wacana tentang kepemimpinan perempuan ternyata kian berkembang dan mendapat respon dari masyarakat, bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Scientific Management (Manajemen Ilmiah). Kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada bakat, keturunan, pengalaman dan gender laki-laki saja, namun lebih dari itu kesiapan fisik dan mental laki-laki dan perempuan secara berencana menuju profesionalisme. Semua program dilakukan lewat perencanaan, analisis dan pengembangan secara sistematis untuk membangkitkan stamina sifat-sifat kepemimpinan yang sesuai dengan ruh syari'at Islam. Tulisan ini mendiskusikan tentang representasi konsep kesetaraan gender dalam di perguruan tinggi. Pertama, kesetaraan gender dipandang sebagai sebuah kondisi ketika perempuan ditempatkan pada posisi setara dan diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Kedua, kesetaraan gender dipandang sebagai sebuah kondisi yang diprediksi akan membawa perubahan bagi kehidupan yang lebih baik. Kedua representasi kesetaraan gender tersebut sangat dipengaruhi oleh*

*sejarah, latar belakang, tujuan, serta visi dan misi organisasi untuk perempuan. Selanjutnya, representasi ini kemudian dimanifestasikan ke dalam fitur-fitur manajerial pada perguruan tinggi.*

**Kata Kunci:** *Gender, Fisik, Mental, Professionalisme*

## **A. Pendahuluan**

Perubahan peradaban manusia dari kehidupan nomaden, turut mengubah konstruksi peran gender. Gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial maupun kultural masyarakat, bukan kondisi biologis manusia. Perbedaan gender sebenarnya tidak menimbulkan menjadi masalah selama ketidakadilan gender, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Gender dalam pengertian ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi perempuan dan laki-laki yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Tercakup di dalamnya adalah pembagian kerja, pola relasi kuasa, perilaku, peralatan, bahasa, persepsi yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Sebagai pranata sosial, gender bukanlah sesuatu yang baku dan tidak berlaku universal. Artinya, gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Isu mengenai peran publik perempuan masih merupakan isu central secara nasional di Indonesia pada dekade terakhir. Persoalan tersebut masih sangat riuh diperdebatkan oleh masyarakat baik secara ilmiah maupun debat kusir. Memang subjek persoalan ini mengandung berbagai aspek yang dapat menimbulkan berbagai kontroversi. Ada kalangan yang dapat menimbulkan berbagai kontroversi. Ada kalangan yang menyetujui bahwa perempuan disejajarkan dengan kaum laki-laki

dalam berbagai posisi, termasuk dalam aspek kepemimpinannya. Pendapat inilah lebih banyak digandrungi oleh yang sering di golongan sebagai kaum modernis. Disisi lain masih banyak kalangan yang belum merasa sreg dengan memposisikan kaum perempuan sejajar dengan laki-laki, terutama sekali dalam persoalan kepemimpinan. Sebagiannya malah secara ekstrim menolak perempuan menjadi pemimpin politik dalam arti perempuan, terutama sekali sebagai pemimpin negara. Untuk yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin lebih banyak merujuk pada teks agama baik al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Gambaran ini sebagai terlalu berpihak kepada laki-laki dan cenderung mendiskreditkan kaum perempuan. Agaknya banyak contoh calon seorang pemimpin dari perempuan kemudian tercekal disebabkan oleh isu agama.

Kaum yang digolongkan modernis, secara jujur harus diakui pikiran-pikiran yang berkembang di Barat, tetapi mereka tetap tidak melepaskan diri dari koridor al-Qur'an. Diawali oleh pengalamannya baik dari praktek kehidupan masyarakat Barat maupun studi mendalam mengenai esensi ajaran Islam mereka berkesimpulan bahwa Islam sebenarnya memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin negara sebagai pemimpin negara.

## **B. Berbagai Teori tentang Gender**

### **1. Teori Alam atau Teori *Nature***

Secara alamiah, biologi laki-laki dan perempuan berbeda, seperti laki-laki mempunyai sperma dan perempuan memiliki rahim, payudara dan mengalami menstruasi sehingga perempuan mampu dan bisa mengandung, melahirkan, serta menyusui, ini pula yang menyebabkan kodrat laki-laki dan perempuan berbeda.

Perbedaan kodrat tersebut sangat mempengaruhi kondisi psikis masing-masing, sehingga secara alamiah terlihat perkembangan sifat psikologis yang dimiliki, misalnya sifat keibuan yang menuntut perempuan memiliki kesabaran yang lebih, kasih sayang, lembut dan sebagainya. Sedangkan kodrat fisik laki-laki terlihat kasar dan tegas. Dengan kodrat fisik dan psikologis tersebut laki-laki dikonstruksikan berperan di sektor publik yang keras sekaligus memberi perlindungan pada pihak yang lebih lemah yaitu perempuan.<sup>1</sup>

Lebih lanjut Ahmad mengemukakan bahwa “Perbedaan kodrat biologis antara keduanya berakibat pada perbedaan perangai psikologis”.<sup>2</sup> Makanya terlihat perbedaan peran secara umum antara laki-laki dan perempuan, laki-laki sangat mendominasi sektor publik dengan modal kekuatan fisiknya, sementara perempuan sangat mendominasi sektor domestik rumah tangga dan sifat lemah lembut dan penyayang serta kesabarannya. Hal ini dipertegas lagi oleh Sanderson (1995) bahwa “Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam bentuk pembagian peran antara kedua jenis kelamin tersebut”.<sup>3</sup>

Perbedaan sifat ini pula dibutuhkan dalam proses kerja manajerial, sehingga paduan antara sifat penyabar yang dimiliki lebih oleh perempuan dengan kekuatan fisik laki-laki, diharapkan mampu mengerjakan kegiatan-kegiatan manajerial. Merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam mengelola organisasi, bahwa laki-laki dan perempuan merupakan sumber daya manusia yang mampu mengelola

---

<sup>1</sup> Budiman, Arif, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*, (Jakarta PT. Gramedia: 1985), hal. 14

<sup>2</sup> Muthali'in, Ahmad, *Bias Gender Dalam Pendidikan* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2001)

<sup>3</sup> Stephen K Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 1995), hal. 89

organisasi secara baik untuk memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diinginkan.

## 2. Teori Nurture atau Kebudayaan

Teori ini bertentangan dengan teori *nature* (alam) sebagaimana disebut diatas. Prinsip dari teori *nurture* adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan bukan disebabkan kodrat alam yang berpunca pada faktor biologis, namun perbedaan itu lebih pada hasil pengembangan melalui pendidikan kultur dan kebudayaan.

Usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan sosial yang berbeda merupakan suatu tindakan yang direncanakan.<sup>4</sup>

Pada umumnya pendidikan yang direncanakan berpihak pada laki-laki, sehingga mengakibatkan dia lebih berpotensi untuk memiliki kekuasaan lebih tinggi terhadap sumber daya ekonomi, termasuk kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarganya. Dari perspektif ini lahir pemilahan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki akses lebih besar pada benda-benda produktif sehingga dia berperan di sektor publik, sebaliknya perempuan yang kebutuhan ekonominya dipenuhi oleh laki-laki, cukup berperan melayani laki-laki di sekitar domestik.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa kenyataan biologis yang membedakan dua jenis kelamin manusia telah melahirkan dua teori, yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Teori ini beranggapan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (*nature*),

---

<sup>4</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*, (Jakarta. Gramedia: 1985).hal. 4

<sup>5</sup> Ahmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*,... hal. 25

anatomi laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memerankan peran utama di dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena memiliki organ reproduksi, maka perannya berada di sektor domestik.

Teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan relasi gender laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh konstruksi sosial, artinya susunan budaya yang telah lama sekali memberikan status dan peran perempuan lebih dominan di sektor domestik rumah tangga, sehingga dia kehilangan waktu dan kesempatan untuk meningkatkan potensi diri melalui membaca, menulis dan belajar, kondisi ini sangat berpengaruh pada kemampuan menduduki posisi manajerial.

### 3. Teori Fungsionalisme Struktural

Masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain secara sistematis, artinya yang satu membutuhkan yang lain, demikian juga sebaliknya, kedua jenis kelamin itu punya kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi.

Pandangan teori yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, masing-masing bagian akan secara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni, dapat menunjukkan posisi teori ini dalam menjelaskan mengenai pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat seperti yang berlaku sekarang ini.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal di atas Faqih juga menyatakan bahwa perbedaan gender ini bisa melahirkan peran gender yang

---

<sup>6</sup> Nasihun, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung, Archicta: 1992), hal. 32

dipermasalahan dewasa ini. Adanya penggunaan analisis gender dalam korelasinya dengan struktur ketidakadilan, dapat dilihat pada terjadinya marginalisasi (kemiskinan ekonomi) terhadap wanita, terjadinya subordinasi pada kaum perempuan, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, mengelola rumah tangga sebagai beban kerja domestik dilimpahkan pada wanita.<sup>7</sup>

Dari manifestasi ketidakadilan gender tersebut di atas akhirnya membaaur dalam bentuk struktur dan sistem kehidupan sosial masyarakat, sehingga memerlukan waktu untuk bisa merubahnya dan mempersoalkan sistem struktur yang telah mapan. Untuk ke depan di harapkan, mempertanyakan posisi perempuan, tidak berarti menggoncang kebiasaan lama (*status quo*) yang telah menyatu dalam masyarakat.

### C. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender didefinisikan oleh Fakih sebagai suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.<sup>8</sup> Dalam dunia Perguruan Tinggi misalnya, juga terlihat gejala ketidakadilan gender dimaksud, sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Hidayati Amal dalam tulisannya yang berjudul Penelitian Yang Berperspektif Perempuan,<sup>9</sup> pada Buku Kajian Wanita Dalam Pembangunan yang disunting oleh Ihromi (1995) mengatakan bahwa "Para ilmuwan di universitas melihat masih adanya ketimpangan hubungan sosial berdasarkan gender".<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Faqih Mansoer, tt, *Analisis Gender dan Feminisme, Majalah Asa Alta*, (Surabaya, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel), hal. 8

<sup>8</sup> Ibid. hal. 9

<sup>9</sup> Ibid. Hal. 10

<sup>10</sup> T. O. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (Yayasan Obor Indonesia : 1995), hal. 111

Perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan gender dibandingkan laki-laki, terutama di sektor domestik, seperti yang di ungkap oleh Ihromi bahwa “Beban kerja lebih banyak dan panjang bagi perempuan”.<sup>11</sup> Ketidakadilan gender telah terjadi akibat konstruksi sosial budaya masyarakat patriarkal, mengakibatkan kerugian yang dialami bukan saja oleh pihak perempuan. Sebagai ilustrasi ketika ketika seorang anak perempuan tidak diberi kesempatan memperoleh pendidikan, berarti ia tidak mampu mendidik anaknya dengan baik dan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara optimal, lebih dari itu dikaitkan dengan kualitas ibadahnya kepada Allah SWT, dia tidak akan memiliki ilmu agama, dia tidak akan paham tentang amar makruf nahi mungkar.

Demikian pula bila perempuan kurang diberikan waktu untuk membaca, belajar dan sebagainya, eksistensinya tidak banyak manfaat kepada orang lain. Menguatnya gugatan tentang ketidakadilan terhadap eksistensi perempuan, lebih disebabkan karena menguatnya isu gender dalam kebangkitan perempuan di berbagai belahan dunia saat ini.

Dalam buku “Keadilan dan Kesejahteraan Gender” yang diterbitkan oleh Team Pemberdayaan Perempuan Departemen Agama RI Jakarta dinyatakan bahwa “dengan berbagai argumennya, gerakan ini menyatakan perempuan telah ditindas oleh sebuah tradisi yang menyatakan laki-laki, menganggap perempuan hanya sekedar makhluk kelas dua yang ditakdirkan untuk mengukuhkan tradisi tersebut”.<sup>12</sup>

Kelompok Islam tradisional memakai kitab-kitab rujukan yang sangat bias gender, sebagai contoh kitab *Uqud al-Lujain* karangan Syeikh Nawawi Banten yang banyak dipakai di pesantren-pesantren di Jawa.

---

<sup>11</sup> T. O. Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, (Jakarta: PPSW, 1990), hal.

<sup>12</sup> Team Pemberdayaan Perempuan, *Keadilan dan Kesejahteraan Gender* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal. 84



Kewajiban utama perempuan adalah melayani suami, isteri adalah perempuan yang bertahan dalam rumah suaminya.

Permasalahan gender di Indonesia memang bukan hal baru dan sekaligus bukan pula mudah imbas trend dunia, namun hampir di setiap provinsi lebih merupakan masalah kultur yang turun temurun yang terjadi karena struktur budaya yang di bangun berdasarkan budaya patriaki yang kuat sehingga mampu mewarnai profil masyarakat setempat. Tetapi berita menggembirakan dari siaran RCTI pukul 23.00 WIB tanggal 18 Februari 2003 DPR, pusat telah mengetuk palu mengesahkan UU Pemilu tentang Quota perempuan di DPR dan DPRD sekurang-kurangnya 30%.

Satu sisi berita itu melegakan kaum perempuan tentunya. Namun di sisi lain banyak pertanyaan yang bisa beruntun, seperti bagaimana mekanisme dan teknis implementasi Undang-Undang tersebut dan yang lebih penting adalah tingkat kualitas perempuan yang diporsikan itu, jangan-jangan seperti yang diungkapkan oleh banyak lembaga penelitian seperti Forum Komunikasi Masa dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (for-Mappi) menyatakan bahwa anggota DPR memang kurang berkualitas. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran di dalam rapat-rapat, rendahnya jumlah produk Undang-undang yang dihasilkan dan ditemukan tingkat kemampuan teknis anggota dewan yang dianggap masih kurang pengalaman dan wawasan organisasi politik praktis yang belum memadai.<sup>13</sup> Sayangnya penelitian tersebut tidak memasukkan gender sehingga sulit menyatakan bila anggota DPR sekarang kurang berkualitas, maka anggota DPR yang sebagian besar (91%) berjenis

---

<sup>13</sup> Riris Khatarina, *www.kompas.com*

kelamin laki-lakilah yang dapat dikatakan tidak berkualitas. Bagaimana dengan anggota DPR yang sebagian kecil (9%) adalah perempuan?<sup>14</sup>.

Lebih lanjut kajian-kajian mengenai gender yang dikaitkan dengan pandangan Islam sebagaimana agama 100% orang Aceh, sudah cukup lama menjadi perhatian para tokoh. Secara spekulatif muncul empat pernyataan seperti ini:

- Pertama** : Adanya kecenderungan diskriminatif memandang bahwa perempuan itu lebih rendah dari pada laki-laki.
- Kedua** : Kecenderungan memandang bahwa perempuan itu lebih unggul dari pada laki-laki
- Ketiga** : Kecenderungan memandang perempuan sejajar dengan laki-laki.
- Keempat** : Perempuan itu tiang negara, bila perempuan itu baik, baiklah negara dan bila perempuan itu buruk maka hancurlah negara.<sup>15</sup>

Cukup menarik untuk dicermati bahwa keempat kecenderungan di atas terdapat pada setiap bangsa di dunia ini, bahkan kelompok masyarakat terkecil sekalipun, timbul pertanyaan kecenderungan manakah yang lebih dominan terjadi dalam masyarakat dunia, lebih khusus lagi pada masyarakat Aceh? Jawabannya adalah jika kita menelusuri kemasa lalu, utamanya jika kita membaca kitab-kitab kuning sebagai representatif dan pandangan-pandangan yang berkembang di abad pertengahan, terlihat bahwa kecenderungan pertamalah yang lebih dominan yakni adanya

---

<sup>14</sup> Sri Djoharwinaslien, Yogyakarta Makalah yang disampaikan pada *Orientasi Pendidikan Politik Berwawasan Gender* pada Jurusan Pemerintahan Fisopol UGM, 23 s/d 28 September 2002, hal. 3

<sup>15</sup> Makalah pada: Raker PSW se-Indonesia di Semarang tanggal 4 s/d 6 Oktober 1997 oleh PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang Perempuan-perempuan”.

kecenderungan diskriminatif bahwa perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Persoalan lantas menjadi lebih besar ketika memandang kecenderungan kitab kitab kuning sebagai interpretasi yang final mengenai pandangan Islam terhadap perempuan karena dengan demikian dapat memberikan kesan bahwa Islam mengajarkan diskriminasi. Suatu kesan yang secara langsung bertentangan dengan semangat misi dan ruh ajaran Islam sebagai “rahmatan Oleh karena itu seruan-seruan untuk melakukan rekonstruksi, revisi dan reaktualisasi pandangan Islam terhadap perempuan, bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Islam, melainkan sejak lahirnya, bahkan pada masa-masa diskriminasi, pandangan diskriminatif tersebut, usaha kearah penjernihan tidak dimuat kecuali di abad modern dalam bentuk yang lebih terarah seiring dengan gema pergerakan emansipasi perempuan.

#### **D. Bias Gender Yang Terbingkai di Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi, baik agama maupun umum seperti UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, idealnya harus memosisikan diri untuk menyaring dan menerima perubahan, tidak saja karena perkembangan keilmuan yang terus mengalami perubahan dan pengayaan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pemberdayaan kualitas masyarakat serta eksistensinya dalam mengkhalifahi bumi ini. Hal itu berarti “Perguruan Tinggi sebagai wadah bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikannya”.<sup>16</sup>

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Studi Kebijakan tentang Kesenjangan Gender di Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan

---

<sup>16</sup> Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, (Logos: Jakarta, 2002), hal. 10

Nasional, di sebutkan bahwa fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa dimensi, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi (*Under - Partisipation*) artinya dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Demikian pula pada tingkat pendidikan tinggi, partisipasi perempuan sangat rendah dan umumnya terbatas pada ilmu-ilmu sosial, humaniora, pendidikan, biologi, kimia dan farmasi.
2. Kurangnya prestasi (*under - achievement*), artinya maskulin sains dan teknologi menyebabkan para remaja putri yang sedang giat membentuk identitas feminimnya bersikap menghindar terhadap subjek tersebut.
3. Kurangnya keterwakilan (*Under - representation*), artinya representasi tenaga perempuan dalam administrasi pendidikan, pengambilan keputusan dan penyusunan kurikulum sangat rendah, sehingga kepentingan murid perempuan kurang mendapat perhatian. Kurikulum dan metode mengajar cenderung bersilat "androsentrik" dengan acuan "man-as-the-norm".
4. Penwakilan yang tidak adil (*unfair - treatment*) artinya kemampuan dan minat murid laki-laki (terutama terhadap sains) terus didorong dan dibina, sementara pengembangan kemampuan dan minat murid perempuan terus menerus mengalami kemerosotan, sehingga pada akhir masa pendidikan kondisinya sering kali berada jauh dibawah rata-rata murid laki-laki.<sup>17</sup>

Pada tahun 1975, PBB membentuk komisi khusus bagi kaum perempuan (*WomenCommision*) yang bertugas merancang program-

---

<sup>17</sup> *Pedoman Pelaksanaan Studi Kebijakan tentang Kesenjangan Gender di Bidang Pendidikan* yang diterbitkan oleh Direktorat Genderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (2001 : 3)

program pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Lebih lanjut komisi ini juga mengusulkan dibentuknya pusat-pusat studi untuk masalah-masalah perempuan di setiap Perguruan Tinggi.

Pusat-pusat studi tersebut tujuannya adalah sebagai basis akademik di Perguruan Tinggi dalam berbagai kajian, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga-lembaga perancang dan pelaksana kebijakan strategis. Salah satu Pusat Studi adalah Pusat Studi Wanita (PSW) yang telah dibentuk sejak tahun 1995. Kegiatan di Pusat Studi Wanita di maksud diarahkan untuk mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan-kesenjangan gender (*gender gap*) dalam berbagai disiplin ilmu." Kajian secara inter-disipliner ini sangat bermanfaat mengingat masalah gender adalah bahagian dari masalah sosial yang sangat kompleks dan saling terkait"<sup>18</sup>

Berdirinya Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry dan Pusat Studi Wanita Universitas Syiah Kuala pada tahun 1995 di Aceh misalnya, merupakan respon dari berbagai tuntutan global terhadap kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Pusat Studi Wanita di Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengkaji secara ilmiah dengan pendekatan multi disiplin ilmu dan mampu member jawaban secara ilmiah pula terhadap berbagai persoalan perempuan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan kualitas perempuan, seperti yang telah pernah dilakukan oleh Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry tentang "Beberapa Bentuk Diskriminasi Antara Pria dan Wanita di Daerah Istimewa Aceh". Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 1997 ini, membuktikan bahwa bias gender yang terjadi di Aceh pada umumnya disebabkan pemahaman teks-teks agama secara parsial.

---

<sup>18</sup> Siti Ruhaini Dzuhatin dari makalahnya tentang *kajian gender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia*: Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001

Lebih jauh Pusat Studi Wanita diharapkan juga dapat memberi masukan bagi lembaga-lembaga pengambilan keputusan terutama Lembaga Kementrian Pemberdayaan Perempuan di Jakarta. Selanjutnya dua Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Aceh, baik Universitas Syiah Kuala maupun UIN Ar-Raniry, secara manajerial kuota perempuan masih jauh dari harapan, misalnya Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan sebagai anggota Senat. Oleh karena itu, agenda yang sangat mendesak bagi Pusat Studi Wanita untuk melakukan berbagai kajian dan masukan bagi perbaikan posisi perempuan di Perguruan Tinggi dan masyarakat pada umumnya.

Solusi ke depan mungkin Pusat Studi Wanita yang ada di Perguruan Tinggi harus lebih giat mengembangkan missinya untuk meningkatkan sensitivitas gender baik secara manajerial maupun secara akademik. Untuk sampai pada posisi praktek manajerial misalnya, upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi *gender mainstreaming* melalui berbagai workshop manajemen. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan Nasional (poin 1, Inpres No. 9 / 2000). Selanjutnya dalam poin 2 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari berubahnya keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dengan demikian rancangan pembangunan yang berwawasan gender adalah perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan laki-laki dan perempuan terhadap akses dan kontrol atas

sumber daya, kesempatan, status, peran, hak dan penghargaan yang ada dalam keluarga dan masyarakat ke dalam seluruh komponen program dan proyek agar dapat menghasilkan alternatif yang efektif untuk memecahkan masalah ketidakseimbangan peran dan kedudukan pria dan wanita.<sup>19</sup>

Kondisi di atas baru bisa terwujud bila laki-laki dan perempuan dilibatkan mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, sampai ke tingkat operasional peran yang harus tercermin dalam program dan proyek pembangunan.

Pada kurun waktu ini semua kita memaklumi bahwa gerakan pemberdayaan perempuan merupakan gerakan transformasi positif untuk meningkatkan kualitas diri perempuan itu sendiri, bukan gerakan balas dendam kepada laki-laki. Jika demikian halnya maka gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia secara fundamental yang lebih baik dan lebih bersahabat dalam upaya mengurangi bentuk bentuk diskriminasi. Hubungan dimaksud tentu saja meliputi multi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, agama, lingkungan, termasuk di dalamnya kebudayaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menata bumi ini.

Nasaruddin mengatakan perlu kiranya diformulasikan kembali semangat keadilan gender yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dalam khazanah pemikiran keagamaan, bagi upaya membongkar wacana keagamaan yang bias gender. Ini merupakan sebuah proses apa yang diistilahkan oleh Kuntowijoyo sebagai objektifitas Islam, salah satu dari agenda program reaktualisasi Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kantor Kementerian Negara Peranan Wanita, 1998, hal. 10

<sup>20</sup> Ibid.

Menanggapi isu gender di Perguruan Tinggi, Rektor IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Rusjdi Ali Muhammad (2002) mengatakan : Dalam percaturan jabatan administrasi atau akademis di lingkungan IAIN Ar-Raniry rasanya kita tidak pantas untuk memberikan prioritas baik kepada kaum laki-laki ataupun perempuan yang belum kapabel untuk itu. Sebaliknya kita tentunya akan menerima hasil yang didapau secara adil dan wajar baik dari kaum lelaki ataupun wanita.<sup>21</sup>

Pernyataan di atas bermakna sumber daya manusia dan kapabelitas seseorang itu yang lebih menentukan dengan rendahnya kemampuan seseorang, sebagaimana digambarkan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqam di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”*.

Untuk itu mungkin kita semua sepakat bahwa perempuan perlu mempersiapkan diri untuk bisa bersanding dan bersinerjik dengan kaum laki-laki secara objektif, logis dan proposional.

## **E. Penutup**

Ketidakadilan gender telah terjadi akibat konstruksi sosial budaya masyarakat patriarkal, mengakibatkan kerugian yang dialami bukan saja oleh pihak perempuan. Sebagai ilustrasi ketika ketika seorang anak perempuan tidak diberi kesempatan memperoleh pendidikan, berarti ia tidak mampu mendidik anaknya dengan baik dan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara optimal,

---

<sup>21</sup> Rusjdi Ali Muhammad, 2002, hal. 3



lebih dari itu dikaitkan dengan kualitas ibadahnya kepada Allah SWT, dia tidak akan memiliki ilmu agama, dia tidak akan paham tentang amar makruf nahi mungkar.

Demikian pula bila perempuan kurang diberikan waktu untuk membaca, belajar dan sebagainya, eksistensinya tidak banyak manfaat kepada orang lain. Menguatnya gugatan tentang ketidakadilan terhadap eksistensi perempuan, lebih disebabkan karena menguatnya isu gender dalam kebangkitan perempuan di berbagai belahan dunia saat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, Habib, HS, *Agama Masyarakat dan Reformasi Kehidupan*, Denpasar, Balai Pustaka: 1998
- Agustian, Ary Ginandjar, *ESQ*, Jakarta, Arga: 2000
- Budiman, Arif, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta PT. Gramedia: 1985
- Danim, Sudarwan, *Media Komunikasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Darwis, *Belajar Menghadapi Abad Ke-21*, 1999
- Faqih, Mansoer, tt, *Analisis Gender dan Feminisme*, *Majalah Asa Alta*, Surabaya, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2000
- Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, Logos: Jakarta, 2002
- Hasibuan, Malayu SP, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN: Yogyakarta, 2000
- Hershey, D.R. *Evaluating metal probe meters for soil testing*, American Biology Teacher: 1992
- Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998
- Made Pidarta. *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

- Makalah Dra. Sri Djoharwinaslien, SU, Ketua Jurusan Pemerintahan Fisopol UGM, Yogyakarta disampaikan pada *orientasi pendidikan politik berwawasan gender* 23 s/d 28 September 2002
- Makalah pada: Raker PSW se-Indonesia di Semarang tanggal 4 s/d 6 Oktober 1997 oleh PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan judul "Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang Perempuan-perempuan".
- Malayu, S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara, 2000
- Muthali'in, Ahmad, *Bias Gender Dalam Pendidikan* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2001
- Nasihun, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Archicta: 1992
- Pedoman Pelaksanaan Studi Kebijakan tentang Kesenjangan Gender di Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional* 2001
- Quraisy Shihab, Prof. DR, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan: 1996
- Reddin, J. William, *Managerial Effectiveness*, Mc. Graw-Hill Book Company: New York, 1973
- Riris Khatarina, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Rusjdi Ali Muhammad, 2002
- Shapiro, Lawrence E, tt. *Mengajar Education Intelegence* terj. Alex Tri Kantjono, Jakarta, Gsadia Pustaka Utama : 2001
- Siagian, Sondang, P, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta Bumi Aksara : 2001
- Siagian, Sondang, P, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Siti Ruhaini Dzuhayatin dari makalahnya tentang *kajian gender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia*: Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pergaulan Pemikiran Feminis Dalam Wacana Islam dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama dengan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Sunderson, Stephen K, *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 1995
- T. O. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia : 1995

Tasmara, Toto, K.H, *Kecerdasan Ruhaniah*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001

Team Pemberdayaan Perempuan, *Keadilan dan Kesejahteraan Gender*  
Jakarta: Departemen Agama RI, 2001

Terry, George, Alih bahasa Winardi, *Azas-azas Manajemen*, Bandung:  
Alumni, 1985